

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan hak bagi semua individu, baik yang memiliki kondisi normal maupun individu yang memiliki keterbatasan. Bagi individu yang memiliki keterbatasan atau yang disebut dengan anak berkebutuhan khusus (ABK) biasanya mendapatkan layanan pendidikan dari sekolah luar biasa (SLB). Pelayanan pendidikan yang dilakukan oleh SLB adalah dengan menempatkan siswa ABK dalam satu kelas yang sama. Pelayanan pendidikan dengan SLB bagi ABK merupakan hal yang lumrah di Indonesia. Jumlah SLB di Indonesia pada tahun 2007 tercatat oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesra (2009) sebanyak 343 SLB berstatus negeri dan 1.112 SLB berstatus swasta.

Pelayanan pendidikan yang diberikan kepada ABK selain dengan SLB adalah dengan pendidikan inklusi. Pada kenyataan di lapangan masih banyak yang menganggap bahwa pendidikan inklusi merupakan bentuk lain dari pendidikan luar biasa, hal tersebut dikemukakan oleh Firdaus dalam Seminar Nasional Pendidikan di Universitas Jenderal Soedirman (2010). Pelaksanaan pendidikan inklusi berbeda dengan pelaksanaan pendidikan di SLB. Sekolah yang menerapkan pendidikan inklusi menempatkan siswa ABK di dalam kelas yang sama dengan siswa normal lainnya, berbeda dengan pelaksanaan sistem pendidikan luar biasa yang menempatkan siswa ABK dalam kelas tersendiri bersama dengan siswa ABK lainnya. Penyelenggaraan pendidikan inklusi akan memberikan kesempatan bagi ABK untuk mendapat layanan pendidikan yang sama dengan anak normal

lainnya dan tumbuh bersama dengan anak-anak seusianya. Sistem pendidikan inklusi sudah lama dikenal di Indonesia, hal tersebut dibuktikan dengan adanya sebuah deklarasi yang membahas mengenai sistem pendidikan inklusi.

Deklarasi tersebut disusun saat Lokakarya Nasional tentang Pendidikan Inklusi di Bandung pada tahun 2004. Lokakarya Nasional yang diadakan di Bandung tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan penting dalam memberikan layanan pendidikan yang setara bagi ABK. Kesepakatan yang dihasilkan dalam lokakarya tersebut antara lain menjamin setiap anak berkelainan dan anak berkebutuhan khusus lainnya mendapatkan kesamaan akses dalam segala hal, menjamin setiap anak berkelainan dan anak berkebutuhan khusus sebagai individu yang bermartabat, menyelenggarakan dan mengembangkan pengelolaan pendidikan inklusi.

Pemerintah mendukung diterapkannya sistem pendidikan yang mampu mengakomodasi setiap individu dengan segala keterbatasannya tersebut. Hal tersebut dibuktikan oleh pemerintah dengan mengeluarkan Permendiknas No. 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusi. Keseriusan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung terlaksananya pendidikan inklusi di Indonesia diharapkan mampu menciptakan budaya baru bagi sistem pendidikan di Indonesia. Penerapan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah mengenai sistem pendidikan inklusi harus diimbangi oleh setiap sekolah di Indonesia. Peran sekolah sangatlah penting bagi tercapainya pelaksanaan sistem pendidikan inklusi, yaitu dengan menerima ABK dalam sekolah tersebut untuk mendapatkan layanan pendidikan yang layak dan setara dengan individu normal lainnya. Selain dengan

menerima ABK, penyediaan sarana dan prasarana juga menjadi faktor penting yang harus dipenuhi oleh sekolah-sekolah yang menerapkan sistem pendidikan inklusi. ABK memiliki kebutuhan yang lebih jika dibandingkan dengan anak normal lainnya, sehingga sarana dan prasarana penunjang yang dibuat khusus untuk ABK perlu dipenuhi oleh pihak sekolah yang menerapkan sistem pendidikan inklusi. Dengan begitu, pelaksanaan sistem pendidikan inklusi akan berjalan dengan baik. Faktor lain yang harus diperhatikan dalam upaya penyelenggaraan sistem pendidikan inklusi adalah tenaga pendidik atau guru.

Guru menjadi pihak yang berperan melaksanakan kegiatan pengajaran, mengembangkan kemampuan siswa sampai dengan memberikan pelayanan teknis dalam memberikan layanan pendidikan (Hermanto, 2010:76). Bagi sekolah yang menerapkan sistem pendidikan inklusi, peran guru sangatlah dibutuhkan, karena guru merupakan pihak yang berinteraksi langsung dengan para siswa termasuk siswa ABK. Keterampilan dan pengetahuan guru mengenai sistem pendidikan inklusi penting sehingga mereka mampu melaksanakan proses pembelajaran yang sesuai dengan keadaan yang terdapat di sekolah inklusi. Pelaksanaan proses pembelajaran yang tepat dan disesuaikan dengan karakteristik siswa akan memaksimalkan hasil proses pembelajaran tersebut. Pada pelaksanaan sistem pendidikan inklusi, faktor guru menjadi salah satu kendala. Guru yang memiliki kapabilitas dalam mengajar ABK masih kurang (Kompas, 2011). Guru yang mengajar di sekolah inklusi merupakan guru yang belum mendapatkan keterampilan dalam mengajar ABK.

Sekolah yang menerapkan sistem pendidikan inklusi juga harus menyediakan guru pendamping khusus (GPK) yang bertugas memberikan ketrampilan bagi ABK serta membantu ABK ketika mengalami kesulitan. Peran dari GPK diharapkan mampu membantu berjalannya proses pelayanan pendidikan bagi siswa ABK. Bukan hanya untuk membantu siswa ABK, tetapi juga diharapkan mampu membantu guru lain ketika melaksanakan proses pembelajaran apabila menemui kendala berkaitan dengan siswa ABK, tetapi pada kenyataannya peran dari GPK belum maksimal karena hanya datang 2-3 hari dalam satu minggu (Solopos, 2014). Beberapa faktor tersebut harus diupayakan oleh sekolah-sekolah yang melaksanakan sistem pendidikan inklusi demi terciptanya pelayanan pendidikan inklusi yang baik.

Berdasarkan Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009, pada pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa:

Pemerintah kabupaten/kota menunjuk paling sedikit 1 (satu) sekolah dasar, dan 1 (satu) sekolah menengah pertama pada setiap kecamatan dan 1 (satu) satuan pendidikan menengah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusi yang wajib menerima peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

Pasal tersebut dimaksudkan untuk menjamin tersedianya sekolah yang menerima ABK untuk mendapatkan pendidikan sesuai tingkatannya. Salah satu sekolah yang ditunjuk untuk melaksanakan sistem pendidikan inklusi pada tingkat menengah pertama di Kabupaten Bantul adalah SMP Negeri 2 Sewon. SMP Negeri 2 Sewon menerima surat keputusan dari pemerintah sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusi pada tanggal 30 April 2013 (Data Sekolah SMP Negeri 2 Sewon).

SMP Negeri 2 Sewon menerima siswa ABK dengan beberapa keterbatasan yang dimiliki, yaitu tuna netra, tuna daksa, tuna rungu, tuna wicara, serta *slow learner*. Siswa ABK yang diterima di SMP Negeri 2 Sewon ditempatkan dalam satu kelas yang sama dengan siswa normal lainnya. SMP Negeri 2 Sewon juga menyediakan sarana prasarana pendukung bagi ABK agar mampu beraktifitas dengan baik di sekolah dalam rangka menempuh pendidikan, hal tersebut terlihat ketika peneliti melakukan observasi awal di sekolah tersebut. Proses penerimaan ABK serta penyediaan sarana dan prasarana bagi ABK oleh SMP Negeri 2 Sewon sebagai faktor pendukung dalam menerapkan pendidikan inklusi bisa dikatakan sudah berjalan dengan baik, tetapi terdapat faktor lain yang masih belum berjalan dengan baik yaitu dari segi pengajar atau guru.

Guru mata pelajaran yang ada di SMP Negeri 2 Sewon tidak memiliki latar belakang pendidikan khusus, salah satunya adalah mata pelajaran IPS. Guru mata pelajaran IPS yang ada di SMP Negeri 2 Sewon berjumlah lima orang, sedangkan yang mengajar pada kelas inklusi berjumlah tiga orang. Tiga orang guru mata pelajaran IPS yang mengajar di kelas inklusi tidak memiliki latar belakang pendidikan khusus. Hal tersebut dibenarkan oleh ketiga guru ketika peneliti melakukan wawancara awal. Mengajar siswa ABK menurut salah satu guru mata pelajaran IPS merupakan hal yang baru karena saat mendapatkan pendidikan sebagai guru tidak mendapatkan pelatihan ataupun pemahaman mengenai cara mengajar siswa ABK. Guru tersebut menambahkan bahwa ketika melaksanakan proses pembelajaran IPS di kelas inklusi, menemui beberapa kendala berkaitan dengan siswa ABK. SMP Negeri 2 Sewon sudah menyediakan satu GPK yang

bertugas untuk memberikan latihan keterampilan bagi siswa ABK serta membantu siswa ABK ketika mengalami kesulitan, tetapi peran tersebut belum berjalan maksimal karena jumlah dari siswa ABK yang lebih banyak dari GPK. Jumlah siswa ABK di SMP Negeri 2 Sewon adalah 21, sedangkan jumlah GPK hanya satu guru.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap proses pembelajaran IPS yang dilakukan oleh guru di kelas inklusi SMP Negeri 2 Sewon. Hal tersebut didasarkan atas adanya perbedaan antara keadaan guru IPS di SMP Negeri 2 Sewon yang tidak memiliki latar belakang pendidikan khusus. Hal lain yang mendasari penelitian ini adalah adanya kendala yang dialami oleh guru IPS di SMP Negeri 2 Sewon ketika melaksanakan proses pembelajaran di kelas inklusi berkaitan dengan siswa ABK.

B. Identifikasi Masalah

Beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi antara lain:

1. Masih banyak yang menganggap bahwa pendidikan inklusi merupakan bentuk lain dari pendidikan luar biasa.
2. Guru yang memiliki kapabilitas dalam mengajar ABK masih kurang.
3. Peran dari guru pendamping khusus (GPK) belum maksimal karena hanya datang 2-3 hari dalam satu minggu.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini dibatasi pada: Guru yang memiliki kapabilitas dalam mengajar ABK masih kurang.

D. Rumusan Masalah

Permasalahan yang menjadi batasan masalah pada penelitian ini juga terjadi di SMP Negeri 2 Sewon. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini akan dilaksanakan di sekolah tersebut dan dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana guru melaksanakan proses pembelajaran IPS di kelas inklusi SMP Negeri 2 Sewon?
2. Apa saja kendala yang ditemui oleh guru saat melaksanakan proses pembelajaran IPS di kelas inklusi SMP Negeri 2 Sewon?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana guru melaksanakan proses pembelajaran IPS di kelas inklusi SMP Negeri 2 Sewon.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang ditemui oleh guru saat melaksanakan proses pembelajaran IPS di kelas inklusi SMP Negeri 2 Sewon.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai kendala guru dalam proses pembelajaran IPS di sekolah inklusi. Penelitian ini dapat dijadikan rujukan dan informasi bagi penelitian sejenis.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Guru

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah masukan bagi guru dalam proses pembelajaran IPS di sekolah inklusi sehingga hasilnya menjadi lebih optimal.

b. Bagi Sekolah

Hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan positif mengenai pengembangan dan penyempurnaan pelaksanaan pendidikan inklusi di sekolah, karena dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan proses pembelajaran kelas inklusi.

c. Bagi Pemerintah

Memberikan masukan dan pemikiran dalam penerapan program pendidikan inklusi yang lebih baik.

d. Bagi Peneliti

Menambah wawasan, pengalaman, dan pengetahuan bagi peneliti dalam melakukan penelitian pendidikan sehingga kelak bermanfaat ketika menemui situasi yang serupa.